

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK NO.01 TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN(Studi pada badan usaha
milik desa tunas harapan desa ombulo kecamatan limboto barat)

Oleh:

MARYAM HALUBANGGA

E11.18.013

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana
Pada fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM SARJANA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

GORONTALO

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS
PUBLIK NO.01 TENTANG PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN**
(studi pada badan usaha milik desa tunas harapan desa ombulo kecamatan
limboto barat)

Oleh :

MARYAM HALUBANGGA

E.11.18.013

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo, 8 Juni 2022

TIM PEMBIMBING

Pembimbing I



Reyther Biki, SE., M.Si
NIDN.0927077001

Pembimbing II



Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN. 0924069002



HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS
PUBLIK NOMOR 01 TENTANG PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN**

**(Studi pada Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Desa Ombulo
Kecamatan limboto barat)**

OLEH :

MARYAM HALUBANGGA

E11.18.013

**Diperiksa Oleh Dewan Penguji Siswa Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo**

1. **Dr. Arifin, SE., M.Si** :
(Ketua Penguji)
2. **Rahma Rizal, SE., M.Si** :
(Anggota Penguji)
3. **Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak** :
(Anggota Penguji)
4. **Reyther Biki, SE., M.Si** :
(Pembimbing Utama)
5. **Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak** :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 09 281169 01

Ketua Program Studi Akuntansi


Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN. 09 200586 01



PERNYATAAN

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arah tim pembimbing
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan kesungguhan dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 13 Juni 2022



E1118013

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan Hidayah-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK NO.01 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (studi pada Badan usaha milik desa tunas harapan desa ombulo kecamatan limboto barat)" sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunan usulan penelitian ini berlangsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan



terimakasih yang tulus Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Reyther Biki, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing hingga usulan penelitian ini dapat selesai, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, teman-teman mahasiswa Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan usulan penelitian ini. Khususnya untuk Mama Salma Nggolitu dan Papa Darwis Halubangga, kakak Yunita Halubangga, ade Windi Halubangga, Sepupu, Om dan Tante, teman-teman pejuang S.Ak yang tanpa henti memberikan dukungan, teman special yang selalu mensupport dan untuk diri sendiri yang tetap semangat hingga usulan penelitian ini bisa terselesaikan.

Akhir kata, semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



Gorontalo,13 juni 2022

MARYAM HALUBANGGA



ABSTRACT

MARYAM HALUBANGGA. E1118013. ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS OF ENTITY WITHOUT PUBLIC ACCOUNTABILITY NO. 01 CONCERNING THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (A STUDY ON THE VILLAGE OWNED ENTERPRISES OF 'TUNAS HARAPAN' AT OMBULO VILLAGE, LIMBOTO BARAT SUBDISTRICT)

This study aims to find and analyze the application of SAK-ETAP (Financial Accounting Standards of Entity without Public Accountability) in the Village Owned-Enterprises of Tunas Harapan (BUMDes Tunas Harapan) at Ombulo Village, Limboto Barat Subdistrict. This type of research in this study is qualitative. The data collection technique used is through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the application of SAK-ETAP to financial statements at BUMDes Tunas Harapan has not been fully following the established financial accounting standards. It is proven by the fact that the financial statements presented by BUMDes Tunas Harapan are incomplete. There is an inaccurate placement of accounts based on SAK-ETAP. It is due to the Manager of financial statements who lacks understanding of the correct and appropriate financial reporting standards following the rules contained in SAK-ETAP.

Keywords: SAK ETAP, Financial Report, BUMDes



ABSTRAK

MARYAM HALUBANGGA. E1118013. ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK NO.01 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BADAN USAHA MILIK DESA TUNAS HARAPAN DESA OMBULO KECAMATAN LIMBOTO BARAT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan SAKETAP di BUMDes Tunas harapan Desa ombulo Kecamatan Limboto barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan di BUMDes tunas harapan belum sepenuhnya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes tunas harapan belum lengkap, yaitu kurang tepatnya penempatan akun yang berdasarkan SAK ETAP. hal ini disebabkan pengelola laporan keuangan yang tidak memahami standar pelaporan keuangan yang benar dan tepat sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam SAK ETAP.

Kata kunci: SAK ETAP, laporan keuangan, BUMDes







DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 pengertian sak etap.....	8
2.1.3 Sak etap.....	10



2.1.4 Pengertian laporan keuangan	15
2.1.5 Pengertian Desa	19
2.1.4 Pengertian Badan Usaha Milik Desa	24
2.1.5 Penelitian Terdahulu	29
2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
 BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian.....	31
3.2 Metode penelitian.....	31
3.2.1 Metode Yang Digunakan.....	32
3.2.2 Desain Penelitian	32
3.2.3 Operasional Variabel	32
3.2.4 Jenis Dan Sumber Data	32
3.2.5 Informan	33
3.2.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.7 Teknik Analisis Data	34
3.2.8 Triangulasi	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian	36
4.1.2 Struktur Lokasi Penelitian	39



4.2	Hasil Penelitian.....	40
4.3	Pembahasan.....	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu.....	29
2.2	Tabel Informan.....	34





DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	30
------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang dikatakan berkembang karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Dalam pertumbuhan ekonomi akuntansi juga berperan sangat penting. Hal ini yang menyebabkan akuntansi menjadi bisnis. Akuntansi juga menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas selama periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada waktu tertentu. Informasi akuntansi sebagai stakeholder dalam pengambilan keputusan entitas. Informasi akuntansi atau informasi keuangan yang dihasilkan dalam proses akuntansi disebut sebagai laporan keuangan, posisi keuangan, dan arus kas, entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam hal ini dibutuhkan standar akuntansi yang berlaku. Standar yang berfungsi memberikan pedoman dan panduan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan perusahaan menjadi sama.

Menurut standar akuntansi keuangan penyusunan laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan yang termuat dalam 5 hal yaitu neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi. Selain itu, apabila standar akuntansi baik maka dalam penyusunan laporan keuangan dapat menjadi lebih



berguna dan tidak menyesatkan untuk penggunaannya. sehingga untuk pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik , relevan dan mutlak sangat diperlukan pada masa sekarang.

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah salah satu lembaga usaha yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa telah diatur dengan undang undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintah desa yang mengamanatkan bahwa badan usaha milik desa didirikan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa (Padesa). Dalam pembentukan badan usaha milik desa dimaksudkan bukan saja untuk menjadi penggerak roda perekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara profesional, sehingga kedua maksud tersebut dapat tercapai (Chabib dan Rochmansyah 2014)

Badan usaha milik desa selanjutnya adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, Jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. (pasal 1, permendesa no.4 tahun 2015). Desa dapat mendirikan bumdes dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni inisiatif desa atau msyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang dapat mengelola bumdes, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk



pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Bumdes wajib untuk membuat laporan keuangan disetiap unit-unit usaha dalam tiap bulan dengan jujur dan transparan. Bumdes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit usaha kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi ini adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal bumdes adalah pengelola, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten atau perbankn dan masyarakat yang memberikan penyertaan modal, serta petugas pajak. Bumdes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan laporan keuangan bumdes harus mengacu pada pedoman umum yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas (SAK ETAP).

Dalam sak etap (2013) pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan ini artinya bahwa badan usaha milik desa (BUMDes) harus



menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu persyaratan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika sudah mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila suatu perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut juga akan mengacu pada SAK ETAP

Pada penelitian Tanugraha (2012) yang membahas tentang evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT. Tunas Dwipa Matra (TDMN). Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa laporan keuangan pada PT.TDMN Sudah memadai karena pelaporannya sudah sesuai dengan SAK ETAP. Sejak tahun 2010, laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, materialistis, dapat diandalkan, memiliki substansi dan realitas. Memiliki pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan dan sesuai dengan SAK ETAP.

Kecamatan limboto barat terdiri dari 10 desa, setiap desa memiliki badan usaha milik desa. Awal munculnya badan usaha milik desa ini pada tahun 2017. salah satu BUMDes yang menjadi lokasi penelitian yaitu BUMDes tunas harapan desa ombulo. BUMDes tunas harapan di desa ombulo kecamatan limboto barat sudah berkembang baik dari produk yang mereka sediakan. BUMDes di desa ombulo memiliki usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dalam bidang perdagangan yakni usaha dagang saprodi, BUMDesmart (minimarket), dan usaha layanan foto copy. sedangkan dalam bidang jasa yakni unit jasa layanan PPOB (BRI



Link dan pulsa). Para pengurus usaha di BUMDes tunas harapan cukup baik dalam mengatur dan menjalankan usaha tersebut sehingga perkembangan usaha di BUMDes sampai sekarang berjalan dengan lancar. dalam buku pengelolaan keuangan BUMDes pencatatan laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang termuat dalam 5 laporan keuangan. BUMDes tunas harapan telah menerapkan 5 laporan keuangan sesuai dengan buku pedoman pengelolaan keuangan BUMDes. Yaitu penerapan sak etap. Penerapan sak etap ini diterapkan dari tahun 2020.

Namun pencatatan laporan keuangan ini belum sepenuhnya penyusunannya berdasarkan kaedah-kaedah yang ada dalam sak etap, salah satunya dari segi pengakuan, konsep penempatan akun yang kurang tepat. Contohnya perlengkapan yang di akui dalam kelompok aset tetap. Seharusnya perlengkapan diakui dalam kelompok aset lancar sedangkan yang tercatat di laporan keuangan tersebut, komponen aset tetap yaitu peralatan dan perlengkapan, jadi masih bercampur antara perlengkapan dan peralatan. kemudian perlengkapan juga tidak disebutkan apa-apa saja yang termasuk dalam perlengkapan, berbeda dengan peralatan yang disebutkan satu persatu. jadi belum adanya pemisah antara peralatan dan perlengkapan yang seharusnya pengakuannya berbeda.

Adanya fenomena bahwa penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh pengelola keuangan BUMDes belum mengikuti pengakuan yang ada dalam PSAK No.01 sehingga penyusunan laporan keuangan tidak berdasarkan standar akuntansi dan prinsip yang berlaku. Maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan



relevansinya serta akan menyesatkan bagi para pengguna

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK(SAK ETAP)NO. 01 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (studi pada BUMDes tunas harapan desa ombulo kecamatan limboto barat)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang pemikiran sebagaimana yang dijelaskan diatas. maka rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana penerapan SAK ETAP No.01 tentang penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan laba/rugi, perubahan modal, posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pada BUMDES Tunas Harapan Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan SAK ETAP tentang penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan laba/rugi, perubahan modal, posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pada BUMDES tunas harapan di Desa ombulo Kecamatan Limboto Barat ?

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan SAK ETAP pengelolaan penyusunan laporan keuangan pada BUMDes tunas harapan di Desa ombulo



Kecamatan Limboto Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana penyusunan laporan keuangan BUMDes tunas harapan melalui penerapan SAK ETAP.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai pengimplementasian ilmu yang didapat di perkuliahan dan menambah pengetahuan,wawasan untuk peneliti.

a. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan,sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Sak

Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan SAK merupakan hasil perumusan komite prinsipal akuntansi indonesia pada tahun 1994 menggantikan prinsip akuntansi indonesia tahun 1984. SAK di indonesia merupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP selain itu juga PSAK syariah dan juga SAP. Ikatan akuntan telah menerbitkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP). SAK ETAP berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai setelah 1 januari 2011.

Penerapan dini diperkenankan SAK yang berbasis IFRS (SAK umum) ditunjukkan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK umum dengan ketentuan pelaporan

yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, maka standard ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh dewan standar ikatan akuntan indonesia (DSAK IAI) dan dewan standar syariah ikatan akuntan indonesia (DSAS IAI) serta praturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.

Efektif 1 januari 2015 yang berlaku di indonesia secara garis besar akan konvergen dengan internatioanal financial reporting standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 januari 2012 menjadi satu tahun di satu januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 dikawasan asia tenggara.

Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara lain, seperti PSAK 28



dan PSAK 38, ISAK 31, ISAK 32, ISAK 35, dan ISAK 36.

Diharapkan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dan IFRS dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat menggunakan SAK sebagai suatu paduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan.

Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti due proses prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Proses tersebut meliputi : identifikasi isu; konsultasi isu dengan Dewan Konsultasi SAK (DKSAK) (jika diperlukan); melakukan riset terbatas, pembahasan, materi SAK pengesahan dan publikasi exposure draft; pelaksanaan publik hearing, pelaksanaan limited hearing (jika diperlukan); pembahasan masukan publik dan pengesahan SAK sedangkan penyusunan buletin teknis dan annual improvements tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process procedure (IAI 2022).

2.1.2 Sak etap

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) dalam SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik.



Yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga peringkat kredit.

Menurut IAI (2018) sak etap bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dan perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada sak umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal ini perlakuan akuntansi relatif tidak berubah selama periode tertentu.

Sak etap digunakan untuk menyajikan informasi keuangan dari entitas yang memiliki transaksi keuangan sederhana dan tidak kompleks, informasi akuntansi yang diatur dalam sak etap meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, ekuitas sementara.

Laporan laba rugi memuat informasi pokok minimal memuat pendapatan, beban keuangan, atau kerugian dari metode ekuitas, beban pajak, dan laba rugi neto.



Berikut ini adalah karakteristik laporan keuangan yang berdasarkan

SAK ETAP :

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar

2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan penggunaan untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil relevansi mereka dimasa lalu

3) Materialistis

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencatumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan



4) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan

5) Subtansi menggali bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya

6) Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tetap disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Pertimbangan yang sehat tidak mengijinkan bisa. Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat

7) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalm batasan material biaya



8) Dapat dibandingkan

Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keputusan.

9) Tepat waktu

Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan

10) Keseimbangan biaya dan manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya persediaan.

2.1.3 Perbedaan SAK ETAP dan PSAK

1. Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK-IFRS cenderung complicated dan rumit
2. SAK ETAP cenderung menggunakan basis stewardship sebagai pertanggung jawaban pengelolaan kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSA-IFRS telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan.
3. SAK ETAP telah mengatur pajak tangguhan



4. SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas
5. SAK ETAP menggunakan cust model untuk investasi ke sosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan
6. SAK ETAP tidak mengatur secara penuh menggunakan PSAK 50/55
7. SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tida
8. berwujud dan properti investasi. PSAK-IFRS boleh memilih cost model atau model reevaluasi

Pada bulan juni 2019, DSAK IAI menyetujui untuk merevisi SAK ETAP dengan mengacu pada IFRS for SMEs 2015, yang kemudian disusun pada tanggal 29 juli 2019 DSAK IAI mengesahkan Draf eksposur SAK entitas private (SAK EP), Publik hearing. DE SAK EP dilakukan pada tanggal 31 agustus 2020 dan masa tanggapan publik sampai 31 maret 2021. Pengesahan SAK EP direncanakan pada tahun 2025 nanti.

Sejak indonesia memutuskan untuk melakukan konvergensi SAK ke IFRS konfigurasi SAK di indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dimana SAK terbagi kedalam beberapa pilar utama yaitu SAK yang diperutukan bagi entitas berakuntabilitas publik signifikan yang



disahkan pada tanggal 19 mei 2009, dan SAK EMKM untuk entitas mikro kecil menengah yang disahkan pada tanggal 24 oktober 2016. Selain itu untuk entitas yang menjalankan transaksi syariah mengacu pada PSAK syariah

2.1.4 Perbedaan SAK EP DAN SAK ETAP

Salah satu alasan SAK ETAP diganti dengan SAK EP dianggap terlalu sederhana untuk digunakan oleh entitas privat. SAK EP disusun lebih terlalu komprehensif dari SAK ETAP namun lebih sederhana dari SAK berbasis IFRS. Berikut ini adalah beberapa SAK EP dengan SAK ETAP sebagaimana tertera pada DE SAK EP :

1. Ruang lingkup

Secara garis besar definisi entitas private dalam SAK Entitas private sama dengan definisi ETAP dalam SAK ETAP, namun tanpa kata signifikan pada akuntabilitas publik dan menjelaskan definisi tersebut

2. Konsep dan prinsip

SAK Entitas privat memperkenalkan dan menjelaskan secara detail mengenai ;

- a) Konsep biaya atau usaha yang berlebihan (undue cost or effort) dibandingkan dengan SAK ETAP yang hanya menjelaskan secara



ringkas tentang keseimbangan antara biaya dan manfaat

- b) Asset kontijensi dan liabilitas kontijensi yang sebelumnya tidak diatur tersendiri dalam SAK ETAP
- c) Total penghasilan komperhensif yang tidak diatur dalam SAK ETAP
- d) Konsep pengukuran pada pengukuran awal untuk aset dan liabilitas entitas dan pengukuran selanjutnya untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, aset nonkeuangan, serta liabilitas selain liabilitas keuangan, yang hanya dibahas secara ringkas dalam SAK ETAP.

3. Penyajian laporan keuangan

Dalam SAK Entitas Privat mencakup pengaturan berikut yang tidak diatur dalam SAK ETAP :

- a) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggungjawab manajemen
- b) Identifikasi cakupan laporan keuangan apakah untuk entitas individual atau kelompok entitas
- c) Memperkenalkan laporan penghasilan komperhensif yang merupakan bagian persyaratan dan laporan keuangan yang lengkap.



d) Menjelaskan penyajian informasi yang tidak di isyaratkan oleh SAK

Entitas Privat

4. Laporan keuangan lengkap

Terdapat beberapa hal yang diatur dalam SAK Entitas Privat namun tidak diatur dalam SAK ETAP antara lain dalam

1 Laporan posisi keuangan

Pos laporan posisi keuangan minimum antara lain : asset keuangan dan liabilitas keuangan, asset biologis, investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas, aset paja tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, serta kepentingan nonpengendali

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatn atas laporan keuangan, yakni utang usaha atau utang lain lain disajikan secara terpisah jumlah yang terutang pada pemasok, pihak istimewa, pendapatan ditangguhkan dan akrual

Terkait modal entitas, akni saham entitas yang dimiliki oleh entiatas atau entitas anak atau entitas asosiasi dan saham yang dicadangkan untuk diterbitkan berdasarkan opsi dan kotrak untuk penjualan saham, termasuk persyaratan dan jumlahnya



Pengungkapan mengenai deskripsi asset atau kelompok asset dan liabilitas, fakta dan keadaan penjualan atau rencana penjualan dan jumlah tercatat asset atau kelompok asset dan liabilitas, jika pada tanggal pelaporan entitas memiliki perjanjian penjualan yang mengikat atas pelepasan besar asset atau kelompok aset dan liabilitas

2 Laporan penghasilan komperhensif dan laporan laba rugi

SAK Entitas private mengatur mengenai penghasilan komperhensif lain dan pos terkait, serta laporan penghasilan komperhensif untuk disajikan dalam satu laporan penghasilan komperhensif atau dalam dua laporan (laporan laba rugi dan laporan penghasilan komperhensif) yang terpisah

SAK Entitas private juga mengatur pengungkapan alokasi laba rugi dan total penghasilan komperhensif kepada kepentingan dan pemilik entitas induk

a. Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo

SAK Entitas privat mengatur penyajian total penghasilan komperhensif yang dapat di distribusikan pada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali.

b. Laporan arus kas



Selain penyajian arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung. SAK Entitas privat memberikan opsi dan menjelaskan penyajian arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. SAK Entitas privat juga menambahkan contoh arus kas dari aktivitas investasi dengan penerimaan (pengeluaran) kas dari future contract, forward contract, opsi contract, dan swap contract, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk jual beli atau penerimaannya (pembayarannya) diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan, dan mengatur lebih detail mengenai arus kas valuta asing, baik dari transaksi entitas dalam valuta asing, maupun dari transaksi arus kas entitas anak luar negeri.

3 Kebijakan akuntansi estimasi

Dalam hal suatu transaksi, kejadian atau kondisi lain tidak diatur secara spesifik. SAK ETAP memperkenalkan manajemen untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam PSAK nonETAP serta pengaturan terkini dari badan penyusunan standar lain yang menggunakan kerangka serupa untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain dan praktik industri yang diterima sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan maupun dalam konsep dan prinsip pervasive dalam SAK ETAP. Dalam hal tersebut SAK Entitas private hanya memperkenalkan entitas untuk mempertimbangkan persyaratan dan



panduan dalam SAK.

SAK Entitas Privat menambahkan beberapa kondisi yang termasuk sebagai perubahan kebijakan akuntansi dan bagaimana penerapan perubahan tersebut, serta jika entitas sulit untuk membedakan apakah perubahan dalam estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diberlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi

4 Instrumen

SAK ETAP mengatur perlakuan akuntansi untuk efek utang dan efek ekuitas yang dimiliki entitas, yang pada saat perolehan harus diklasifikasikan kedalam salah satu kategori berikut ini

- a) Dimiliki hingga jatuh tempo (disajikan pada biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto)
- b) Diperdagangkan (diukur pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang belum direalisasikan diakui dalam laba rugi)
- c) Tersedia untuk dijual (pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang belum direalisasi diakui sebagai komponen ekuitas terpisah)

SAK Entitas private mengatur secara lebih detail dan kompleks perlakuan akuntansi untuk instrument keuangan (Aset keuangan dan



liabilitas keuangan) dan memberikan opsi

- a) Persyaratan dalam bab 11 instrumen keuangan dasar dan Bab 12 isu terkait instrumen keuangan lain (keduanya) secara keseluruhan atau
- b) Persyaratan pengakuan dan pengukuran PSAK 55 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran (efektif 1 Januari 2018) dan persyaratan pengungkapan dalam bab 11 dan bab 12 SAK entitas privat

SAK Entitas privat menjelaskan apa saja yang termasuk sebagai instrumen keuangan dasar beserta contohnya, instrumen keuangan lain, perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan termasuk pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya (biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar pada laba rugi), penurunan nilai aset keuangan dan penghentian nilai aset keuangan atau liabilitas keuangan, serta mengatur mengenai lindung nilai

5 Persediaan

Secara garis besar pengaturan mengenai persediaan dalam bab 13 PSAK Entitas privat sama dengan dalam SAK ETAP, Namun SAK Entitas privat secara tegas mengecualikan aset biologis dan persediaan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melalui laba rugi yang dimiliki oleh (a) produsen produk agriculture, kehutanan dan mineral,



dan (b) pialang dan pedagang komoditas, untuk menerapkan bab 13 ini

6 Investasi

SAK ETAP mengatur pengaturan investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas, dan investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas menggunakan metode biaya (biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai)

SAK Entitas privat mengatur antara lain bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak yang dikendalikannya dengan menyajikan laporan keuangan yang konsolidasi, sedangkan investasi pada entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas dicatat dengan menggunakan salah satu metode berikut :

- a) Metode biaya
- b) Metode ekuitas
- c) Metode nilai wajar

Dan mengatur perlakuan akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki pengendalian bersama, atau jika memiliki pengaruh signifikan dalam ventura bersama. SAK Entitas privat juga mengatur persyaratan pencatatan investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi dan



pengendalian bersama entitas dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan laporan keuangan konsolidasi.

7 Properti investasi

SAK Entitas privat mengatur lebih detail mengenai definisi, pengukuran pada pengakuan awal dan pengakuan selanjutnya, serta pengungkapan properti investasi. Pengukuran properti investasi dapat menggunakan nilai wajar dengan perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi atau menggunakan model biaya sedangkan dalam SAK ETAP pengukuran properti investasi hanya menggunakan model biaya

8 Aset tetap

Dalam SAK Entitas privat diatur bahwa entitas dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk kelas aset tetapnya, termasuk perlakuan atas peningkatan (penurunan) nilai tercatat aset tetap akibat revaluasi serta pengungkapan terkait aset tetap yang menggunakan model revaluasi, sedangkan dalam SAK ETAP entitas menggunakan model biaya untuk aset tetap dan penyimpangan dari model ini (revaluasi) hanya diizinkan berdasarkan ketentuan pemerintah



9 Aset tak berwujud sebelum goodwill

SAK Entitas Privat menegaskan prinsip umum pengakuan aset tak berwujud dengan menambahkan syarat bahwa aset tak berwujud hanya dapat diakui jika aset tidak dihasilkan dari pengeluaran yang timbul secara internal untuk item tak berwujud, serta mengatur perlakuan untuk aset tak berwujud yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis dan dari hibah pemerintah, yang tidak diatur dalam SAK ETAP.

10 Sewa

SAK Entitas Privat menegaskan ruang lingkup sewa yang termasuk perjanjian substansi merupakan sewa dan pengecualian ruang lingkup penerapan sewa, serta menambahkan indikator situasi dimana suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. SAK Entitas Privat juga mengatur lebih detail perlakuan akuntansi baik untuk sewa pembiayaan maupun sewa operasi dalam laporan keuangan

11 Provisi dan kontijensi

Secara garis besar persyaratan tentang provisi dan kontijensi SAK Entitas Privat sama dengan SAK ETAP, Namun SAK Entitas privat mengatur pengakuan liabilitas kontijensi dan persyaratan pengakuan aset kontijensi



12Liabilitas dan ekuitas

ETAP hanya menjelaskan secara singkat klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya dimasa yang akan datang dan mengatur akuntansi ekuitas entitas. Namun SAK Entitas Privat mengatur persyaratan tentang klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas secara lebih detail, penjualan opsi, hak dan waran, kapitalis saham, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas, serta kepentingan non pengendali dan transaksi dalam saham pada entitas anak yang dikonsolidasikan.

13Penurunan nilai aset

Beberapa hal yang diatur dalam SAK Entitas Privat selain yang diatur dalam SAK ETAP antara lain :

- a) Prinsip umum penurunan nilai asset selain persediaan, termasuk definisi jumlah terpulihkan dan nilai pakai serta pengukuran jumlah terpulihkan dan nilai pakai
- b) Pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai unit penghasil kas



- c) Pengaturan tambahan untuk penurunan nilai goodwill
- d) Pemulihan kerugian nilai termasuk ketika jumlah terpulihkan ketika estimasi untuk penghasil kas

14 Imbalan kerja

SAK Entitas Privat mengatur tentang (a) imbalan yang vesting dan belum vesting dalam pengukuran kewajiban imbalan pasti dan (b) pengakuan dan pengukuran beban imbalan kerja untuk entitas anak, serta pengungkapannya yang sebelumnya tidak diatur dalam SAK ETAP.

15 Pajak penghasilan

SAK ETAP mengatur secara ringkas pajak penghasilan entitas (berdasarkan peraturan perpajakan), sedangkan SAK Entitas Privat mengatur mengenai pajak tangguhan dan hal terkait seperti prinsip pengakuan pajak tangguhan, dasar pengenaan pajak atas asset dan liabilitas, perbedaan temporer, pengukuran pajak tangguhan, serta saling hapus pajak kini dan pajak tangguhan

16 Penjabaran valuta asing

SAK Entitas privat mengatur antara lain mengenai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri



kedalam mata uang penyajian entitas (investor), yang belum diatur dalam sak etap.

17 Peristiwa setelah akhir periode

SAK Entitas Privat menegaskan definisi peristiwa setelah periode pelaporan termasuk seluruh peristiwa terbaru ketika laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, walaupun peristiwa tersebut terjadi setelah pengumuman publik atas laba rugi atau informasi keuangan lainnya, dan menambahkan contoh peristiwa non penyesuaian yang dibuat pengungkapannya antara lain tentang kombinasi bisnis signifikan, penerbitan atau pembelian kembali utang atau instrumen ekuitas entitas, dan perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang berpengaruh signifikan pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan

18 Pengungkapan pihak berelasi

SAK Entitas Privat mengecualikan persyaratan pengungkapan tertentu sehubungan dengan (a) kekuasaan pemerintah yang mempunyai pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor dan (b) entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena pemerintah yang sama mempunyai pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor dan entitas lain tersebut,



yang sebelumnya tidak diatur dalam SAK ETAP

19Lain lain

Hal-hal inilah yang diatur dalam SAK Entitas Privat dan tidak mengatur dalam SAK ETAP sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri
- b. Instrument keuangan tentang lindung nilai
- c. Kombinasi bisnis goodwill
- d. Hibah pemerintah
- e. Pembayaran berbasis saham
- f. Hiperinflasi
- g. Aktivitas khusus yang mencakup agrikultur, eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, dan perjanjian konsesi jasa

2.1.5Laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain ang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban,



penghasilan dan beban. Komponen laporan keuangan berdasarkan SAK

ETAP terdiri dari :

1. Neraca

Dalam SAK ETAP laporan neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu-akhir periode pelaporan.

Informasi yang disajikan dalam neraca menurut SAK ETAP, neraca

minimum mencakup pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya
- c) Persediaan
- d) Properti investasi
- e) Aset tetap
- f) Aset tidak berwujud
- g) Utang usaha dan utang lainnya
- h) Aset dan kewajiban pajak
- i) Kewajiban diestimasi
- j) Ekuitas
- k) Laporan laba rugi

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika

penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi

keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan



terhadap pos pos yang disajikan

Dalam klasifikasi aset dan kewajiban Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas
- b) dimiliki untuk diperdagangkan
- c) diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar.

Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas,



maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Urutan dan format pos dalam neraca. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Sebagai tambahan pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan. entitas uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas. Pertimbangan atas pos-pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penilaian:

- a) sifat dan likuiditas aset
- b) fungsi aset dalam entitas dan jumlah,
- c) sifat dan waktu kewajiban

Dalam dunia akuntansi, dikenal istilah “aset” sebagai kekayaan yang memiliki oleh perusahaan ketika melakukan proses operasinya. Nilai aset tersebut selalu dievaluasi dan dimasukkan dalam laporan keuangan



nantinya. Sehingga para akuntan harus mengenal dengan jelas berbagai macam aset di dunia akuntansi

Aset perusahaan terdiri dari tiga jenis. Yaitu aset tetap, aset lancar, dan aset tidak tetap. Berbagai jenis aset tersebut berbeda dan memiliki pengertian sendiri.

Aset tetap merupakan sebuah properti yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Jenis aset yang aset ini memang sifatnya sangat jangka panjang, serta diperkirakan tidak akan dijual dalam waktu panjang. Minimal proses penjualannya pun diperkirakan tidak kurang dari 1 tahun.

Aset tetap tidak sama dengan inventaris (barang-barang seperti meja, kursi dan lainnya). Aset tetap adalah barang yang sangat penting bagi perusahaan dan nantinya hanya dibeli atau disewa sekali dalam jangka waktu beberapa tahun.

Ciri ciri aset tetap :

- a) Bisa menyusut / punya nilai depresi (untuk aset berwujud)
- b) Bisa menyusut / punya nilai amortisasi (untuk aset tak berwujud)
- c) Bersifat disposisi jika aset tersebut dibuang



1) Pengertian aset lancar

Selain aset tetap, dalam akuntansi juga terdapat aset lancar. Aset lancar adalah sebuah sebutan untuk aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa diubah menjadi uang tunai. Dengan kata lain, aset lancar merupakan aset yang bisa diukur dengan sebutan nilai mata uang.

Aktiva atau aset lancar adalah segala kekayaan berupa sumber daya benda atau hak yang dikuasai perusahaan. Harta ini dimiliki oleh perusahaan melalui proses transaksi atau operasional lainnya di masa lalu.

Harta ini diharapkan dapat dicairkan selama kurang dari setahun alias satu periode akuntansi. Pentingnya aset lancar dalam neraca adalah sebagai syarat memelihara likuiditas perusahaan. Misalnya manajemen piutang, kas, persediaan dan lain-lain

Aktiva lancar juga menjadi sumber daya perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Maka dari itu, aktiva lancar disebut memiliki manfaat ekonomi dimasa depan.

Jenis jenis aktiv lancar :

a) Kas

Kas adalah harta yang berada didalam kas perusahaan maupun



di rekening bank milik perusahaan. Kas dapat dicairkan sewaktu waktu

b) Surat berharga

Surat berharga berupa kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lainnya yang bersifat temporer, artinya dapat dijual lagi kapan saja.

c) Piutang wessel

Piutang wessel adalah surat perintah untuk menagih kepada seseorang atau badan agar membayar uang pada jumlah dan jatuh tempo yang sudah ditetapkan sebelumnya. Uang tersebut harus diserahkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat.

d) Piutang dagang

Piutang dagang adalah penagihan dari perusahaan ke pihak yang berutang (debitur). Utang ini disebabkan transaksi yang dilakukan dengan kredit

e) Piutang pendapatan

Piutang pendapatan adalah pemasukan yang belum diterima pembayaran tetapi sudah ditetapkan sebagai hak perusahaan.

f) Perlengkapan



Segala peralatan yang digunakan untuk operasional perusahaan, sifatnya habis pakai

g) Beban dibayar dimuka

pelunasan beban yang dilakukan di muka, tetapi sebenarnya belum termasuk kewajiban pada siklus itu

h) Persediaan dagang

Suatu produk dibeli agar dapat dijual ulang dan bertujuan memperoleh keuntungan

1) Pengertian equipment (peralatan)

Didalam dunia akuntansi, peralatan atau equipment adalah berbagai barang ataupun berbagai tempat yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjalankan seluruh kegiatan bisnis perusahaan. Pada umumnya, peralatan-peralatan ini memiliki umur yang panjang atau than lama jika dibandingkan dengan peralatan. Contoh sederhana dari peralatan dari peralatan adlah furniture, komputer atau laptop, kendaraan kantor, mesin produksi sampai dengan gedung atau gudang dari perusahaan itu sendiri. Dalam peralatan terbagi 2 kategori yaitu peralatan besar, dan peralatan kecil.



a) Peralatan besar

Peralatan besar pada jenis equipment adalah berbagai aset ataupun aktiva perusahaan yang kemungkinan besar bisa dijual kembali, atau bisa saja menghasilkan pendapatan perusahaan

Peralatan ini juga nantinya akan masuk ke saldo aktiva tetap ketika pembeliannya yang itu artinya nanti perlu diadakan penyusutan. Contoh nyata dari peralatan besar ini adalah gedung, gudang, komputer, kendaraan, mesin produksi, furniture kantor dll.

b) Peralatan kecil

Peralatan kecil pada jenis peralatan adalah berbagai barang barang yang mampu memenuhi kriteria atau mampu memenuhi persyaratan sebagai peralatan namun berbentuk berbagai material kecil yang memiliki peran penting demi kelancaran operasional perusahaan.

Contoh sederhana dari peralatan kecil adalah gunting, obeng, kotak penyimpanan, mouse, staples, dll.

Seperti halnya peralatan besar, ketika peralatan kecil dibeli, maka peralatan kecil juga nantinya akan tertulis didalam aktiva tetap, yang nantinya akan mengalami proses penyusutan



Adapun ciri ciri dari peralatan :

- a) Barang habis pakai dan memiliki biaya penyusutan
- b) Bisa dijual kembali walaupun harganya menurun dari pembelian awal
- c) Memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun
- d) Memiliki harga lebih mahal dan ukurannya lebih besar daripada barang perlengkapan
- e) Umumnya memerlukan bantuan listrik atau bahan bakar tertentu
- f) Memiliki peranan yang sangat penting dalam operasi perusahaan
- g) Laporan keuangan dan masuk sebagai aktiva tetap

2) Pengertian supplies (perlengkapan)

Didalam suatu perusahaan, pastinya memerlukan berbagai barang seperti kertas, polpen, tinta printer, dan berbagai barang lainnya yang memiliki kemungkinan habis terpakai.

Berbagai barang tersebut memang akan terlihat sederhana, tapi memiliki peranan penting dalam membantu setiap kegiatan operasional



perusahaan. Berbagai barang tersebut yang bisa dimasukkan kedalam kategori perlengkapan.

Jadi intinya dalam dunia akuntansi perlengkapan atau supplies adalah berbagai barang yang dimiliki perusahaan yang masih bersifat habis dipakai atau bisa digunakan berkali-kali

Pada umumnya, berbagai barang yang termasuk kedalam perlengkapan atau supplies memiliki bentuk yang cenderung lebih kecil dan memiliki tujuan guna melengkapi keperluan perusahaan, tapi walaupun terlihat kecil, supplies atau perlengkapan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perlengkapan kantor dan perlengkapan pabrik.

Berikut ini ciri-ciri dari perlengkapan :

- a) Barang yang habis dipakai dan tidak memiliki biaya penyusutan
- b) Perlengkapan tidak bisa dijual kembali
- c) Memiliki umur pemakaian maksimal satu tahun
- d) Harganya relatif lebih murah dan relatif lebih kecil
- e) Bisa digunakan tanpa listrik
- f) Tujuannya untuk pelengkap operasional



g) Pembeliannya akan tercatat dalam laporan keuangan.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi memasukan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Informasi yang disajikan dilaporan laba rugi, dalam SAK ETAP. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d) Beban pajak
- e) Laba atau rugi neto

3. Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi saldo dan saldo laba

Informasi yang disajikan dilaporan perubahan ekuitas, dalam SAK ETAP entitas menyajikan laporan perubahan entitas yang menunjukan :



- a) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- b) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan.
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah yang berasal dari :
 - 1) Laba atau rugi netto
 - 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - 3) Jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi dalam treasur, dan deviden serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan



investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu waktu dan merupakan bagian yang terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus :

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan SAK ETAP.
2. Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan. Dan,
3. Memberikan informasi tambahan yang telah disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan



2.1.6 Laporan keuangan

2.1.2.1 Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Transaksi keuangan adalah transaksi yang mempengaruhi kondisi keuangan, contohnya adalah pembelian dan penjualan Prihadi (2019).

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan koperasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas lain diluar perusahaan.

Ikatan akuntansi indonesia (2015) mengemukakan pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari



suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba/rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba/rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan untuk perusahaan terdiri dari laporan laporan yang melaporkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, yang dilaporkan dalam neraca dan perhitungan laba/rugi serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas dimana neraca menunjukan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu, sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan laporan keuangan

Hery 2018 dalam bukunya yang berjudul analisis laporan keuangan mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus laporan keuangan adlah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya



ekonomi dan kewajiban perusahaan.

2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usah dalam mencari laba
3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah berfungsi sebagai “alat penguji” dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya seiring dengan perkembangan jaman fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penelitian atas posisi keuangan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. laporan keuangan juga akan dapat menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. struktur modal perusahaan, pendistribusian pada aktiva, efektifitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang telah dicapai, beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai buku dari setiap lembar



saham perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Rudini (2016) tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset. Perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih besar. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

2.1.2.3 Fungsi laporan keuangan

Laporan keuangan sebagai dasar untuk menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan. Dengan menggunakan hasil analisis maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Melalui laporan keuangan, laporan keuangan juga dapat menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek



struktur modal perusahaan, pendistribusian pada aktivanya, efektifitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai dari setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.

2.1.3. Desa

2.1.3.1 Pengertian Desa

Pengertian desa dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa di Indonesia mempunyai karakteristik dan jenis yang beragam akan tetapi kedudukan dan keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya, dalam negara kesatuan republik Indonesia. Dalam undang-undang no-6 tahun 2014 tentang desa bab II pasal 5 dijelaskan desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota, desa terdiri atas desa dan desa adat. Desa adat mempunyai pengertian penyebutan desa yang disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Desa memiliki karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat memiliki karakteristik yang berbeda dari



desa pada umumnya karena masih kuatnya pengaruh adat terhadap sumberdaya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa yang dipelihara dan dijalankan secara turun temurun. Akan tetapi, negara tetap mengakui dan menghormati apabila masih sesuai prinsip NKRI penyelenggaraan desa dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa ditetapkan pengaturan desa berdasarkan asas :

- a) Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- b) Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- c) Keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- d) Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa
- e) Kegotongroyongan yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa
- f) Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat dan sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- g) Musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa dan melalui diskusi



dengan berbagai pihak yang berkepentingan

- h) Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa.
- i) Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- j) Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
- k) Kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran\
- l) Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m) Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa

Tujuan pengaturan desa :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan beragamannya sebelum dan sesudah terbentuknya



negara kesatuan republik indonesia

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketat negara republik indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat indonesia
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk penegmbangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efesien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercayai perwujudan kesejahteraan umum
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat. Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai objek pembangunan. Desa merupakan wilayah berada paling inti dalam hubungan langsung dengan masyarakat yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai



berbagai keanekaragaman yang berbeda, setiap desa memiliki potensi dan kekayaan baik sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung dan apabila dikembangkan dan dikelola mampu menjadi sumber pendapatan desa

2.1.3.2 Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia adalah pengertian dari pemerintah desa dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa bab 1 pasal 1 untuk melaksanakan pemerintah desa maka dibentuklah pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa/adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peranan penting terhadap kelancaran masyarakat menuju kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa sehingga dapat disimpulkan tugas pemerintah desa adalah memberi pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah desa disertai dengan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis yaitu badan permusyawaratan



desa (BPD) yang bertugas membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa melalui musyawarah desa yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

2.1.3.3 Peraturan Desa

Berdasarkan penjelasan atas Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penetapan Peraturan Desa dilakukan secara demokratis dan partisipatif dimana masyarakat ikut serta dalam proses penyusunannya, masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat maupun saran. Dalam pelaksanaan peraturan desa diawasi oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawasan bertujuan agar pelaksanaan Peraturan Desa berjalan untuk kepentingan masyarakat Desa. Fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Desa

2.1.3.4 Potensi Desa

Potensi desa ialah segala kekayaan yang dimiliki oleh desa baik sumber daya alam maupun yang lainnya. Potensi yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga akan memperoleh manfaat yang



baik bagi masyarakat, pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

2.1.7 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

2.1.4.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pasal 1 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan usaha dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa dimana modalnya yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah untuk mengelola asset, jasa pelayanan, dan usahalainya. Dimana BUM Desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

BUM Desa adalah lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial yang mempunyai beberapa perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya, melihat dari tujuan pembentukannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka diharapkan dari keberadaanya bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa. Modal awal dari BUM Desa bersumber dari Pemerintah Desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan tetapi modal selanjutnya juga didapat dari masyarakat desa maupun pihak lain seperti bantuan dari Pemerintah. Modal BUMDesa tidak diizinkan jika berasal dari Warga Negara Asing atau institusi Asing. Desa dapat mendirikan BUM Desa melalui kesepakatan yang disetujui dalam



musyawarah desa. Hasil musyawarah yang berupa kesepakatan akan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan pembentukan BUM Desa dengan pertimbangan dari masyarakat desa dan pemerintah desa, adanya potensi usaha masyarakat sesuai kebutuhan, dengan tersedianya sumber daya desa dan kekayaan desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha, adanya unit usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Yabbar& Hamzah,2016,583) Hasil kesepakatan melalui musyawarah desa menjadi pedoman bagi Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik desa Prinsip prinsip dalam pendirian BUMDesa menurut, (Yabbar&Hamzah,2016,583)

1. Kooperatif, BUMDesa dapat bekerja sama dengan BUMDesa lain maupun dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan BUMDesa tersebut
2. Partisipatif, pengelolaan BUMDesa tidak hanya pada sekelompok tertentu saja, tetapi masyarakat desa terlibat baik dalam pengadaan, produksi, pemasaran, penjualan dan lain-lain
3. Emansipatif, pendirian BUMDesa tidak hanya dikelola secara eksklusif pada golongan tertentu, tetapi juga melibatkan wanita, kelompok



masyarakat miskin, kelompok penyandang cacat dan lain-lain. Prinsip-prinsip BUM Desa sebagai badan yang didirikan oleh masyarakat desa.

Berikut adalah prinsip-prinsip BUM Desa sebagai badan yang didirikan oleh masyarakat :

- a) BUMDesa bersifat terbuka, semua masyarakat dapat mengakses semua kegiatannya
- b) BUMDesa bersifat sosial (social entrepreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan.
- c) BUMDesa harus dikelola dari pihak-pihak yang independen, pengelola tidak boleh berasal dari unsur Pemerintahan Desa.
- d) BUMDesa tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat Desa yang sudah berjalan tapi bagaimana BUMDesa mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka. Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik desa.

Tabel 2.1 klasifikasi jenis usaha BUM Desatunas harapan

No	Jenis	Pengertian	Contoh
1	Bidang pertanian	BUM Desa Memberikan kemudahan untuk para petani mencari bibit dan pupuk pertanian di sekitar mereka dan ini menjadi salah satu penyemangat keberlangsungan dalam bidang pertanian	a. pupuk b. bibit
2	Bisnis berdagang	BUM Desa melayani kebutuhan masyarakat desa bumdesmart ditunjukan untuk memperoleh pendapatan desa	a. usaha b. usaha pulsa
3	Usaha jasa	Memberikan jasa dagang pelayanan pada warga	a. usaha jasa fotocopy b. usaha jasa brilink

2.1.4.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Adapun tujuan dari pendirian BUMDes sendiri secara lengkap termuat dalam permendagri nomor 4 tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014.

1. Meningkatkan perekonomian desa



2. Mengoptimalkan aset desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat
4. Kerja sam antar desa/dan atau pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan PAD

2.1.4.3 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (Yabbar & Hamzah, 2016, 222). Peraturan menteri dalam negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa dan pengertian pendapatan desa dalam permendagri 113 tahun 2014 adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa mempunyai dasar yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) dalam satu tahun anggaran. berdasarkan UU No 6 tahun 2014 pasal 72, Peraturan Menteri



Dalam Negeri no.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal (2) memaparkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan asli desa pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa yang terdiri dari :

1. hasil usaha antara lain bagi hasil BUM Desa
2. hasil asset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasardesa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
3. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan desa yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
4. pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa

Pendapatan transfer terdiri dari:

- a) Dana desa yaitu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c) Alokasi dana desa yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima



Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa

d) Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota Pendapatan lainnya yaitu : penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, pendapatan lain desa yang sah

2. 2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut.



Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Beth Sianne Andreas (2014)	Evaluasi Atas Setiap koperasi telah Penerapan Standar melakukan pencatatan Akuntansi sederhana akuntansi Keuangan Entitas namun tidak sesuai Tanpa Akuntabilitas dengan SAK ETAP Publik (SAKETAP) sehingga perlu Pada Laporan Dilakukan pengenalan Keuangan dan sosialisasiSAKETAP Koperasi di Kota Penguru terhadap koperasi di Bandar Lampung (Studi Kasus Pada KPRI di Bandar Lampung)	
2	Rafflesia Nurdita (2012)	Analisis Penerapan Standar yang ada di Kota Dumai Akuntansi sudah melakukan Keuangan Entitas pelaporan keuangan Tanpa sederhana namun hanya Akuntabilitas sebagian kecil yang Publik (SAKETAP) benar-benar menerapkan Pada Koperasi SAKETAP ke dalam Yang Ada diDumai laporan	

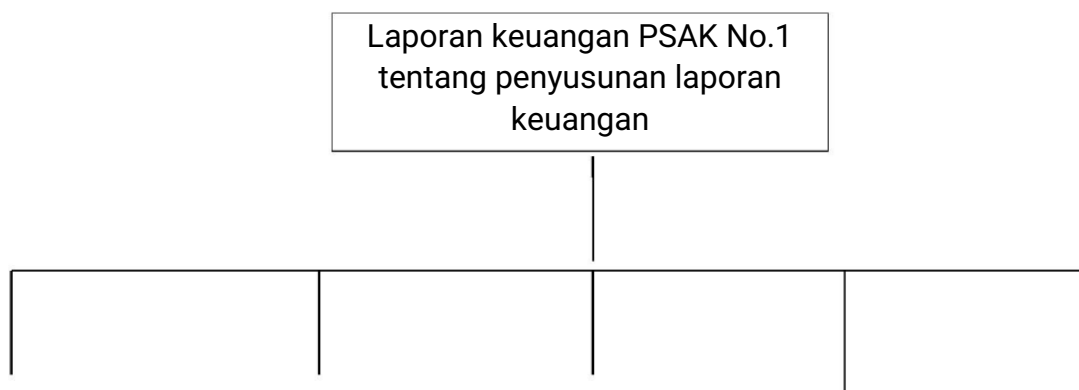
3	Alifta Lutfiaazahra (2015)	Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa ETAP dan ada yang tidak Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Pengrajin Batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta	UMKM Pengrajin batik kampoeng Laweyan Surakarta ada Sudah menerapkan SAK ETAP dan ada yang tidak menerapkan SAK ETAP. Dari 19 responden hanya enam UMKM pengrajin batik yang membuat laporan keuangan dan menerapkan SAK ETAP.
---	----------------------------------	---	--

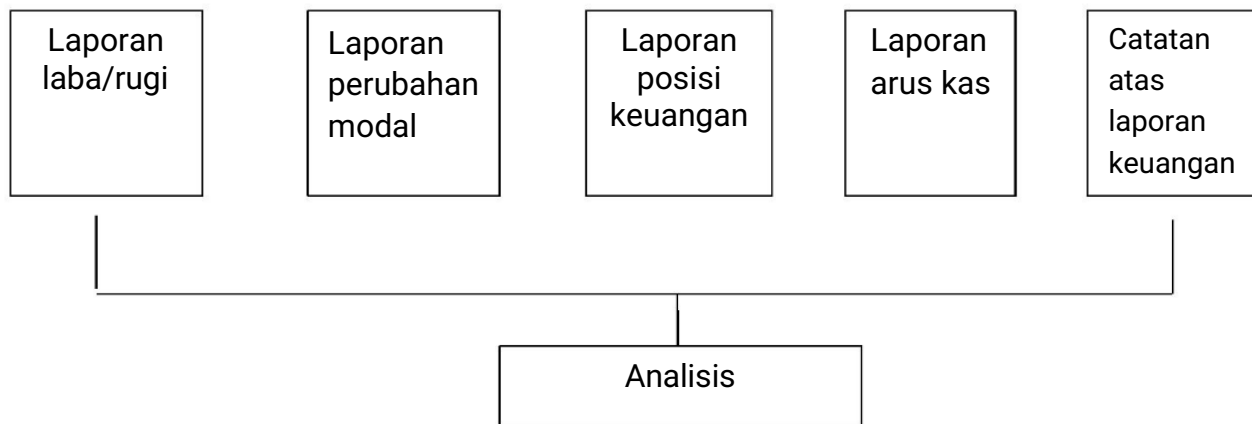
2.3 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2012:272) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting

.Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diuraikan maka yang akan menjadi obyek penelitian adalah Analisis Penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada badan usaha milik desa (studi pada BUMDES tunas harapan di desa ombulo kecamatan limboto barat)

3.2 Metode penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2012:58) Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, atau unsur peristiwa pada masa sekarang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-

permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan

3.2.2 Desain Penelitian

Menurut Arikunto (2019, hlm. 136) metode penelitian yaitu cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan wawancara sebagai alat pengambilan data pokok

3.2.3 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut sugiyono (2015,h.38) adalah suatu atribut sifat dan nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun operasional variabel SAK ETAP No. 01 tentang penyusunan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal,laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3.2.4 Jenis Dan Sumber Data

a. jenis data

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan



menggambarkan penerapan sak etap tentang penyusunan laporan keuangan keuangan BUMDes.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisa fenomena peristiwa yang ada secara mendalam oleh peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama dari obyek dan permasalahan penelitian. Peneliti memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami peristiwa yang ada sehingga akan memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai implelementasi penerapan sak etap tentang penyusunan laporan keuangan.

a. Sumber Data

1. Data Primer

adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui proses pengamatan dan wawancara dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

3.2.5 Informan

Sugiyono, (2012:54) menjelaskan informan (narasumber) penelitian



yaitu seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informasi dari penelitian ini berasal dari wawancara yang disebut dengan narasumber. Agar peneliti dapat memperoleh informan yang benar benar memenuhi persyaratan dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya apakah benar atau tidak, penentu informan untuk penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.

Berikut adalah data informan :

Tabel 3.2

Data Informan

Nama	Jabatan
Irfan eksan,SH	Kepala desa
Felmi Lantowa, SE,M.Ak	Direktur
Selawati Ejoyi, S.Keb	Sekretaris
Sarpin Wasir, Pd	Bendahara

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak bumdes



yang ditunjukkan kepada pengurus-pengurus bumdes.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah guna untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan mengumpulkan data yang menyangkut bumdes tunas harapan.

3.2.7 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data ialah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Setelah kita mengumpulkan data yang diperoleh hasil wawancara, dokumentasi yang ada di lokasi penelitian kita akan melakukan analisis data. Analisis data adalah proses pengelolaan data menjadi suatu informasi yang baru, sudah dimengerti dan dipahami sehingga dengan mudah untuk mengambil kesimpulan.

3.2.8 Triangulasi

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono dalam (Sinatriyo & dkk, 2019).

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk



menguji data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada ataupun membandingkan hasil wawancara dari responden (data primer) dengan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

2) Triangulasi tehnik

Triangulasi tehnik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama dengan tehnik, yang berbeda.

3) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Desa ombulo Kecamatan Limboto Barat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu laporan keuangan yang ada pada BUMDes. Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang objek penelitian, maka peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar belakang objek penelitian.

4.1.1.1 Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Lokasi Desa Ombulo

Desa Ombulo adalah salah satu Desa yang berada di kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Desa ombulo adalah salah satu desa (kampung) dari sepuluh desa yang berada di wilayah kecamatan limboto barat. Desa ombulo dibuka pada tahun 1805 pada zaman jajahan belanda, pada waktu itu kepala desa adalah bpk Kengo dengan gelar adat TI Bonga, yang pada waktu itu desa ombulo masi



hutan belantara yang terdapat di belahan barat kecamatan limboto barat (limutu).desa ombulo memiliki luas wilayah 1000 hadengan jumlah penduduk sekitar 1106 jiwa. Kepala desa ombulo sekarang adalah bpk Irfan eksan.SH.majoritas penduduk di desa ombulo yaitu bermata pencaharian sebagai petani.

4.1.1.2 Gambaran Umum BUMDes Tunas Harapan

Badan usaha milik Desa ombulo tunas harapan bergerak dibidang perdagangan.munculnya badan usaha milik desaini pada tahun 2017 yang diawali dengan adanya anggaran dana desa diperuntukan pengembanganperekonomian diDesa. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah. masyarakat desa berinisiatif mengelola anggaran tersebut dengan membentuksuatu badan yang dinamakan badan usaha milik desa.

Pada tahun 2017 bumdes tunas harapan mulai didirikan dengan telah terbentuknya pengurus pengurus BUMDes,dengan bermodalkan anggaran yang pas-pasansehingga usaha pertama kali yang dijalankan oleh BUMDes tunas harapan hanya berupa warung kecil



yang didalamnya dijual barang-barang yang minim.lambat laun dengan adanya keuntungan yang didapatkan dan ada sumbangsi dari para pengurus BUMDes maka usaha di BUMDes tersebut meningkat.

Sumbangsi dari pengurus-pengurus yaitu mereka sukarela dalam mengurus bumdes dengan tidak mengharapkan upah atau gaji.dalam usaha pertama kali dijalankan oleh bumdes tersebut masing-masing pengurus juga memberikan dana karena minimya modal yang akan di kelolah. Dengan pengorbanan para pengurus BUMDes begitu besar akhirnya bumdes tersebut mempunyai usaha yang cukup maju dan berkembang sampai saat ini karena melihat dari usaha yang dijalankan oleh bumdes tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. contohnya usaha fotocopy, bumdes tersebut bertepatan dipinggiran sekolah, kemudian usaha minimarket yang didalamnya dijual kebutuhan rumah tangga, penjualan pulsa, usaha brilink mengingat disekitar tempat itu tidak ada ATM,dan saprodi yang menjual pupuk dan bibitkarena di desa tersebut banyak warga yang bermata pencaharian sebagai petani.

4.1.2 Visi Dan Misi BUMDes Tunas Harapan

1. Visi BUMDes Tunas Harapan



Visi dari BUMDes Tunas Harapan ombulo “menjadi lembaga Usaha Desa yang terpercaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

2. Misi dari BUMDes Tunas Harapan

BUMDes Tunas Harapan ombulo mempunyai misi sebagai berikut :

- 1) Mengolah potensi Desa agar dapat dimanfaatkan sebaik baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ombulo
- 2) Menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan BUM Desa
- 3) Mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha
- 4) Memanfaatkan teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat

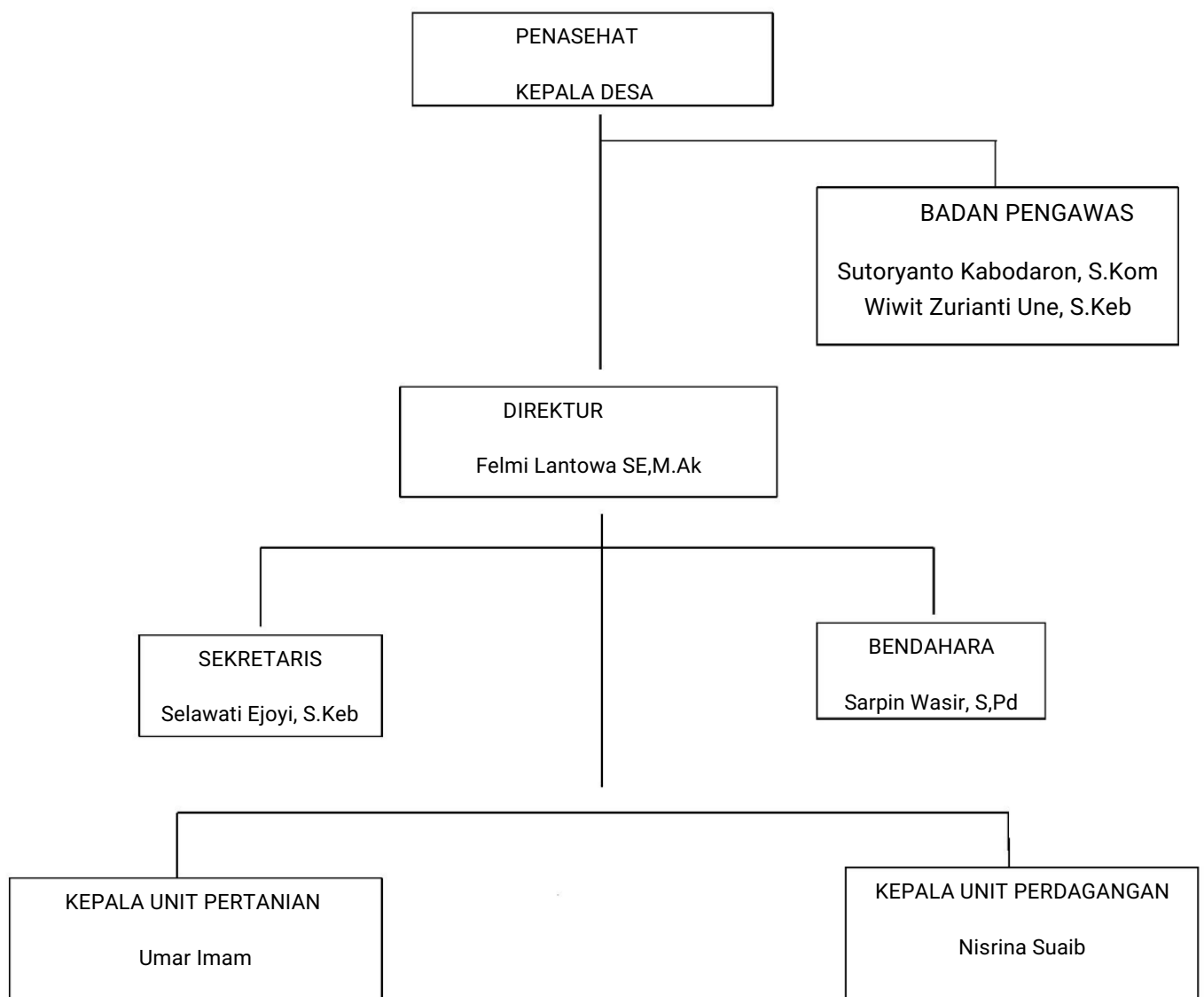
4.1.3 Struktur Organisasi BUMDes Tunas Harapan

Struktur organisasi adalah suatu susunan yang saling berhubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain sehingga akan menciptakan satu citra keharmonisan yang mendorong terbentuknya kegiatan untuk mencapai satu tujuan yang mendasar. Struktur organisasi BUMDes memegang peran penting bagi kelancaran pengelolaan BUMDes. Fungsi



dari struktur BUMDes ini adalah memperjelas setiap fungsi dan hubungan antara bagian dalam sebuah organisasi. Berikut adalah struktur kepengurusan organisasi BUMDes.

GAMBAR 4.1.3 STRUKTUR ORGANISASI BUMDES TUNAS HARAPAN



Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing pengurus BUMDes :

1. Penasehat BUMDes

penasehatBUMDes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa penasehat juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usah desa, berdasarkan visi dan misi dalam RPJM Desa.

Selain itu tugas, hak dan kewajiban penasehat BUMDes yaitu menyepakati musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes

2. Pengawas BUMDes

Pengawas BUMDes bertugas mengawasi semua kegiatan dan



memberikan nasehar kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melakukan tugasnya mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksana operasional setiap diakhir tahun
- 2) Meminta laporan rincian neraca, rugi laba dan penjelasan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus/pelaksana operasional

3. Direktur BUMDes

Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan

Berikut ini beberapa tugas dari direktur BUMDes

- 1) Memimpin, mengelola dan mengurus badan badan usaha milik desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes



- 2) Merumuskan standar operasional prosedur (SOP) unit unit usaha BUMDes
- 3) Merumuskan kebijakan operasioanl pengelolaan BUMDes
- 4) Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal
- 5) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola badan usaha milik desa dengan persetujuan komisaris/pembina BUMDes
- 6) Mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuas hukum untuk mewakilina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- 7) Bertindak tas nama lembaga BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan koordinasi dengan komisaris
- 8) Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada komisaris dan pengawas BUMDes, dan
- 9) Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan



keuangan BUMDes akhir tahu kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum

4. Sekretaris BUMDes

Tugas dari sekretaris BUMDes yaitu melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi usaha BUMDes

Tugas dari sekretaris juga meliputi :

- 1) Melaksnakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan direktur
- 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- 3) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administarasi setiap unit usaha badan usaha milik desa (BUMDes)
- 4) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes)
- 5) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan usaha milik



desa (BUMDes)

6) Mengelola surat menyurat secara umum

7) Melaksanakan kearsipan

8) Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes)

5. Bendahara

Fungsi dari bendahara yaitu mengelola laporan keuangan BUMDes.

Tugas dari bendahara antara lain :

1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi

keuangan unit usaha BUMDes

2) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes

3) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran

keuangan unit usaha BUMDes

4) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola

belanja dan pengadaan barang/jasa/ unit usaha BUMDes



- 5) Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes
- 6) Menyusun laporan pengelola keuangan unit usaha BUMDes
- 7) Melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya
- 8) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 9) Mengatur likwiditasi sesuai dengan keperluan
- 10) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari direktur.

6. Kepala unit

Kepala unit melaksanakan fungsi pengelolaan unit usaha di BUMDes adapun tugas dari kepala unit yaitu :

- 1) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan unit usaha
- 2) Kepala unit setiap usaha mencatat pemasukan dan



pengeluaran setiap hari dan di setor kepada pengelola

laporan keuangan (bendahara)

- 3) Kepala unit bertanggung jawab atas usaha yang dipercayakan oleh direktur

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDES tunas harapan Desa ombulo

Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik terdiri dari kerangka konseptual, dalam penyusunan laporan keuangan dan pernyataan standar akuntansi. Kerangka konseptual terdiri dari tujuan, kompetensi laporan, karakteristik, kualitatif, asumsi penyusunan laporan keuangan, pengaturan transaksi, dan komponen dalam laporan keuangan. Dalam pengaturan yang terkait dengan komponen laporan keuangan terdiri dari definisi, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan

Dalam catatan atas laporan keuangan BUMDes menyatakan bahwa laporan keuangan BUMDesa tunas harapan untuk tahun 2021 telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) dan peraturan menteri desa dan PDTT Nomor 4 tahun 2015, serta petunjuk teknis asistensi tata kelola keuangan



dan kinerja badan usaha milik desa nomor : PED-12/D5/05/2016, tanggal 2 september 2016, oleh deputi Bidang Akuntan negara, Badan pemeriksa dan pengawasan pembangunan.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP ini harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement),, atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika memenuhi semua persyaratan yang ada dalam SAK ETAP.

Peneliti telah melakukan wawancara bersama narasumber utama ibu Sela Ejoyi S.keb selaku pengelola laporan keuangan yang ada di BUMDes tunas harapan. Berikut ini merupakan hasil wawancara, adapun pertanyaan yang peneliti tanyakan yaitu bagaimana penerapan SAK ETAP di bumdes tunas harapan ?

“penerapan standar akuntansi ini dimulai pada tahun 2020, jadi dari pertama berdirinya bumdes, laporan keuangan disusun secara manual. Ditahun 2017 itu bendahara yang menyusun laporan keuangan. Kemudian kami dapat bimbingan cara menyusun laporan keuangan yang benar dengan meggunakan exel.jadi di exel itu saya hanya memasukan kode dan muncul akun akunnya. Saya disini menjabat sebagai sekretaris jadi karena mungkin saja saya lancar dalam mengaplikasikan komputer jadi saya yang menyusun laporan keuangan.saya juga bukan dari jurusan akuntansi, saya hanya jurusan kebidanan begitu juga dengan bendahara dia hanya jurusan pendidikan”(senin, 11 mei 2022)

Laporan keuangan hanya di susun oleh sekretaris, dan sekretaris



tersebut tidak memahami akuntansi dengan hanya mengandalkan komputer dalam membuat laporan keuangan, lalu peneliti melakukan wawancara lagi bersama Bendahara dari BUMDes tersebut dengan menanyakan, bagaimana pencatatan secara manual yang ibu catat bagaimana penempatan akun yang ibu catat dalam catatan tersebut.?

“jadi saya ini bukan dari jurusan akuntansi, saya memang paham sedikit tentang akuntansi makanyasaya menyusun laporan keuangan secara manual, sekretaris itu menyusun dengan komputer karena saya tidak terlalu paham tentang komputer, sekretaris lebih mahir dari saya jadi dia yang mengaplikasikan laporan keuangan dalam komputer, soalnya kalo pakai komputer itu lebih mudah, untuk pencatatan manual saya rekap dalam setiap hari, pencatatan transaksinya itu sama dengan yang di komputer tapi komputer lebih lengkap saya hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan”

kurangnya pemahaman akuntansi oleh sekretaris dan bendahara ini, membuat ibu direktur menyatakan bahwa akibat sekretaris dan bendahara yang tidak mempunyai basic dalam akuntansi dan hanya mengandalkan aplikasi maka itu termasuk menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersam ibu Felmi Lantowa. SE, M.Ak. selaku direktur BUMDes tunas harapan dengan mempertanyakan kendala apa saja yang ada di BUMDes tunas harapan ?

“kendala yang pertama yaitu dari sisi kepengurusan atau SDM, pertama memang selama ini untuk sdm. Dibumdes itu kita



mengikuti aturan menteri desa disitu kan ada rencana adrt, jadi bumdes Harus mengacu disitu berarti ada pengurus pengurus bumdes, bumdes itu harus terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, kepala unit serta turun dipengurus, misalnya bumdesmart ada pengurusnya, saprodi ada juga pengurus saprodinya yang dalam struktur itu termasuk dalam kepala unit. kendala yang selama ini yaitu dalam penetapan pengurus misalnya yang ditetapkan bendahara tapi tidak sesuai dengan basic ilmunya, kenapa seperti itu karena kewenangan dari pemilihan pengurus bumdes bukan di desa tapi dia harus ada musyawarah mufakat antara kepala desa, BPD, toko masyarakat, aparat desa, lpm untuk menentukan pengurus bumdes sehingga dalam perekrutan penempatan masing masing pengurus itu walaupun bukan basicnya tapi karna sudah musyawarah mufakatnya sudah seperti itu jadi ditetapkan disitu sehingga yang menjadi kendala kami bendahara yang tidak bisa membuat laporan keuangan karena bukan basicnya maka dari itu, dia tida tau mengelola laporan keuangan dan laporan keuangan hanya dikelola oleh sekretaris karena sekretaris lebih memahami komputer jadi kendala kami di SDM pengurus yang ditempatkan tidak sesuai dengan basicnya”(senin, 11 april 2022)

Tanggapan lain dari informan lainnya yaitu bapak Irfan eksan SH

selaku kepada desa, dengan mempertanyakan bagaimana tanggapan

bapak terkait dengan pengurus bumdes tunas harapan yang tugas

kepengurusannya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuannya, misalnya

bendahara yang tidak mempunyai basic dalam akuntansi ?

“jadi pemilihan kepengurusan bumdes itu dilakukan secara musyawarah mufakat. kewenangan dari pemilihan struktur kepengurusan bumdes itu harus berdasarkan musyawarah mufakat. dengan di hadiri oleh beberapa masyarakat, aparat desa, LPM, BPD, Toko masyarakat, dan termasuk saya sendiri jadi semuanya berkumpul disitu dengan tujuan memilih siapa saja yang akan mengisi struktur kepengurusan bumdes. Untuk ketidaksesuaian basicnya itu kami tidak melihat distu, kami hanya memilih dengan



muyawarah mufakat, jadi kami langsung menunjuk misalnya ibu direktornya kami pilih ibu felmi jadi kalau masyarakat yang hadir disitu menyetujuinya dan yang bersangkutan mengatakan bersedia jadi dia yang terpilih, saya rasa tidak sesuai basicnya itu tidak ada masalahnya karena untuk laporan keuangan itu disusun menggunakan exel dan kami telah memberi bimbingan cara mengelola laporan keuangan yang benar kepada semua pengurus yang ada di bumdes. jadi kalau untuk bendahara dia hanya menyusun secara manual karena dia kurang paham dalam hal yang terkait dengan komputer sedangkan sekretaris menyusun dalam komputer yaitu menggunakan exel, tapi yang mengetahui kondisi keuangan itu hanya bendahara sekretaris hanya membantu mengaplikasikan laporan keuangan kedalam exel dan bendahara juga bertugas dengan menyusun laporan keuangan secara manual. Jadi menurut saya tidak ada kendala dalam hal penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh sekretaris dan bendahara yang tidak mempunyai basic atau ilmu pengetahuan dalam akuntansi.

Setelah adanya pernyataan dari ibu direktur BUMDes bahwa salah satu kendala yang terjadi diBUMDes tunas harapan yaitu dalam pemilihan pengurus yang kurang tepat, sehingga penyusunan laporan keuangan hanya disusun oleh sekretaris yang tidak punya basic dalam akuntansi dengan hanya mengandalkan aplikasi. Dan tanggapan dari bapak kepala desa yang tidak mempermasalahkan hal itu. maka kemudian peneliti menganalisis laporan keuangan yang disusun oleh sekretaris dalam penggunaan komputer

Kemudian peneliti menemukan keganjalan dalam laporan keuangannya yaitu terdapat kesalahan pencatatan di dalam asset tetap.

Maka peneliti mempertanyakan kembali kepada sekretaris



mengapa dalam laporan keuangan tersebut perlengkapan disebut peralatan dan diakui dalam kelompok aset tetap ?sedangkan dalam standar akuntansi keuangan perlengkapan seharusnya termasuk di dalam aset lancar, dan mengapa juga dalam perlengkapan itu tidak disebutkan apa saja yang termasuk dalam perlengkapan berbeda dengan peralatan yang disebutkan satu-persatu apa saja yang termasuk dalam peralatan.

“memang disitu tercatat peralatan dan perlengkapan masuk dalam aset tetap. perlengkapan itu kan cuman sedikit misalnya polpen, kertas, jadi dalam satu bulan itu kemungkinan pengeluarannya cuman sampe Rp 50.000 kemudian kita sudah masukan di catatan harian, kalo untuk dilaporan keuangan tahunan itu sudah ditotalkan dari catatan harian dan dimasukan kedalam aktiva tetap yang nama akunnya perlengkapan toko jadi dia sudah menjadi satu disitu, diperlengkapakan toko itu, saya kan ada dapa bimbingan jadi pencatatn perlengkapan yang dimasukan dalam aset tetap itu saya dapat di tempat saya ada bimbingan akan itu, dia sudah memang begitu jadi saya hanya mengikuti apa saja yang ada didalam akun akun exel itu. Jadi di exel itu Perlengkapan toko tidak disebutkan satu satu persatu, dan tidak dimasukan ke dalam aset lancar dia hanya dimasukan kedalam aset tetap. kalo untuk perlengkapan yang tertulis di aset tetap dan disebutkan ada meja biro mesin foto copy dll itu hanya kesalahan pencatatannya kaeena saya juga tidak tahu kalo perlengkapan dan peralatan itu berbeda”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman akuntansi dari pengelola laporan keuangan yang ada di bumdes maka laporan keuangan yang disajikan tidak berdasarkan standar akuntansi keuangan.

hal ini karena dalam akuntansi perlengkapan dan peralatan beda



pengakuannya, perlengkapan termasuk dalam komponen aset lancar karena pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Perlengkapan (supplies) bisa menjadi salah satu biaya perusahaan yang Peralatan pada Segala umumnya lebih tahan lama (masa manfaatnya lebih lama) jika dibandingkan dengan perlengkapan (supplies). Istilah peralatan dalam akuntansi mengacu pada mesin, perabot dan peralatan kantor, kendaraan komputer, perangkat elektronik dan mesin perkantoran besar (tergantung pada jenis usaha) berbeda dengan peralatan yang diakui dalam aset tetap karena peralatan adalah suatu alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya adalah untuk mendukung berjalannya pekerjaan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes tunas harapan

SAK ETAP digunakan untuk menyajikan informasi keuangan dari entitas yang memiliki transaksi keuangan sederhana dan tidak kompleks. SAK ETAP memiliki karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan, materialistis, keandalan, substansi menggali bentuk, dan pertimbangan sehat. ini berarti sak etap membantu penyajian laporan keuangan yang lebih jelas dan kompleks. dalam penerapan SAK ETAP kelengkapan dari



laporan keuangan juga termasuk salah satu karakteristik. jika suatu entitas menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya, laporan keuangan tersebut mencakup ketentuan yang ada dalam SAK ETAP

Menurut Rudhini 2016 penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes sangat diperlukan alasannya bahwa laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi SAK ETAP mempunyai kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya untuk manajemen yang digunakan untuk pengambilan keputusan kita juga dapat melihat posisi keuangan BUMDes

Berdasarkan dari hasil wawancara yang ditemukan di BUMDes tunas harapan dalam laporan keuangannya, Penyajian laporan keuangan yang disajikan belum berdasarkan SAK ETAP yang ditetapkan.hal ini dikarenakan faktor SDM. Penyajian laporan keuangan hanya disusun oleh sekretaris dengan mengandalkan komputer, dan bendahara yang menyusun secara manual kurangnya pemahaman akuntansi dari pengelola laporan keuangan mengakibatkan laporan keuangannya tidak lengkap penyajian pos-pos yang kurang tepat dalam penempatannya. Hal ini juga di karenakan tidak adanya pengawasan dari pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan BUMDes terutama dari pihak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait.



Pengelola laporan keuangan perlu diberikan pemahaman terkait manfaat dari pencatatan akuntansi yang benar, lebih memperjelas pelaporan keuangan yang di sajikan agar tidak menyesatkan bagi pembaca laporan keuangan.

Berikut ini penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.01 :

1. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan perusahaan yang memberikan informasi posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Pos pos dalam neraca yaitu : kas, dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas

Pada laporan keuangan BUMDes tunas harapan pos pos dalam neraca telah tercatat. Dalam SAK ETAP komponen neraca yaitu asset lancar yang terdiri dari akunkas pentingnya laporan arus kas adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan suatu entitas. Memonitor arus kas memudahkan suatu entitas menentukan pertimbangan yang terbaik dan dapat menjadi tolak ukur pengambilan keputusan. dalam laporan keuangan kas disajikan oleh BUMDes tunas harapan dalam 2 tahun yaitu



periode 2020 dan 2021 dalam SAK ETAP laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas.

Entitas tersebut harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Entitas juga harus dapat membandingkan laporan keuangan untuk mengevaluasi posisi keuangan. kemudian untuk bank setiap akhir bulan suatu entitas perlu melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan informasi saldo yang tercatat dalam buku besar dan rekening bank. Kegiatan ini bertujuan untuk merapikan laporan keuangan suatu entitas sehingga menjadi lebih akurat, serta mengetahui setiap pengeluaran dan penerimaan yang terjadi. Dalam pencatatan akun bank di laporan keuangan BUMDes. Badan usaha milik desa tersebut telah melakukan rekonsiliasi dilihat dari laporan keuangannya yaitu pada rekening koran. Pengeluarannya dicatat di asset tidak lancar.

selanjutnya untuk persediaan, dalam laporan keuangan BUMDes persediaan merupakan barang yang dimiliki untuk dijual kembali, selanjutnya untuk biaya dibayar dimuka, penyertaan modal usaha patungan, harta lancar tidak diakui berapa nominalnya. Lalu untuk komponen aktiva tetap akun pertama yang ada dalam laporan keuangannya yaitu tanah, gedung/bangunan. kemudian tercatat



perlengkapan BUMDesmart , ini artinya terjadi kesalahan pencatatan karena dalam SAK ETAP perlengkapan diakui dalam asset lancar. Bukan dalam asset tetap karena asset tetap merupakan asset yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relative permanen, asset tetap juga dapat mengalami penyusutan nilai, beberapa contoh dari jenis ini yaitu gedung dan bangunan, tanah dan peralatan.

Berdasarkan hasil penelitian pencatatan peralatan dan perlengkapan di akui dalam asset tetap namun di catat sebagai perlengkapan. Contohnya dalam laporan keuangan BUMDes terdapat akun perlengkapan BUMDesmart, perlengkapan usaha saprodi, perlengkapan usaha foto copy, perlengkapan usaha pulsa, perlengkapan usaha bri link dan perlengkapan kantor, hal ini berarti perlengkapan dan peralatan diakui dalam akun perlengkapan artinya tidak ada pemisah antara akun peralatan dan perlengkapan. Dalam SAK ETAP entitas harus menyajikan asset lancar dan asset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan. Maka semua asset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.



Selanjutnya untuk aktiva lain lain dalam laporan keuangan BUMDes komponen di dalamnya yaitu biaya operasi, aktiva tak berwujud lainnya dan akumulasi amortisasi tidak ada nominalnya, begitu juga dengan kewajiban lancar semua hutang tidak di nominalkan karena berdasarkan hasil penelitian BUMDes tersebut tidak memiliki hutang. Dalam SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos pos yang disajikan.

2. Laporan laba rugi

Dalam SAK ETAP Laporan laba rugi ini mencakup pos pos yaitu pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

pencatatan laporan laba rugi suatu entitas harus memasukan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode. Dalam SAK ETAP pencatatan laporan laba rugi elemen utamanya yaitu pendapatan atau penjualan bersih. Pencatatan laporan laba rugi yang ada dalam laporan keuangan di BUMDes hanya mencatat pendapatan, hal ini karena pendapatan sama dengan penjualan. Pencatatan laporan laba rugi yang ada di BUMDes tunas harapan yaitu terdiri dari pos pendapatan dan biaya biaya. Dalam pos pendapatan semua pendapatan usaha yang ada di BUMDes tunas harapan di nominalkan hasil pendapatannya kecuali pada



tahun 2020 pendapatan usaha dagang saprodi, pendapatan usaha jasa foto copy pendapatan usaha dagang pulsa tidak di catat pada tahun 2020 hal ini karena pada tahun 2020 BUMDes ini masi memiliki usaha yang minim sehingga pencatatan pendapatannya hanya ada pada tahun 2021. Kemudian pada beban pada laporan keuangan yang ada di BUMDes tunas harapan mencatat beban dengan biaya. Hal ini karena beban sama saja dengan biaya. Biaya merupakan besaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Biaya di laporan keuangan BUMDes tunas harapan terdiri dari biaya usaha dan biaya operasional .

dalam SAK ETAP beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai dengan metode terpisah dari beban lainnya misalnya pendapatan, beban pokok penjualan, laba bruto, pendapatan operasi lainnya, beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban operasi lain, dan laba operasi. Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi di BUMDes tidak mencatat beban pemasaran hal ini karena BUMDes tunas harapan tidak melakukan pemasaran.



Kemudian untuk pencatatan harga pokok penjualan tidak tercatat di laporan laba rugi tersebut. dalam SAK ETAP pencatatan hpp diakui dalam laporan laba rugi, pencatatan Hpp ini di narasikan di catatan atas laporan keuangan, menurut SAK ETAP catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

3. laporan perubahan modal

dalam SAK ETAP Laporan perubahan modal menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

untuk pencatatan laporan perubahan modal di laporan keuangan BUMDes Entitas menyajikan laporan perubahan modal pada tahun 2020 modal dari pemerintah desa tidak ada dan hanya pada tahun 2021. Pada tahun 2020 BUMDes ini mempunyai modal yang sangat minim, berbeda dengan tahun 2021. Dalam laporan keuangan di BUMDes komponen ekuitas rekonsiliasi tercatat di awal dan akhir periode diungkapkan secara



terpisah rugi laba ditahan dan rugi laba tahun berjalan dalam satu periode, kemudian dikurangi dengan pembagian sisa hasil usaha hanya dalam satu tahun yang didalamnya tercatat akun pendapatan diakui dengan pendapatan asli Desa.

Dalam SAK ETAP untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari laba atau rugi, pendapatan dan beban diakui langsung dalam ekuitas. Jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya kepemilikan ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan deviden serta distribusi lainnya kepemilikan ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

4. laporan arus kas

pencatatan laporan arus kas berdasarkan SAK ETAP Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Dalam akuntansi pencatatan arus kas terbagi atas dua metode yaitu



metode langsung dan metode tidak langsung. pencatatan laporan arus kas di BUMDes tunas harapan menggunakan metode tidak langsung.

Data yang digunakan untuk membuat laporan arus kas ini yaitu, laporan laba rugi periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Metode tidak langsung memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, metode tidak langsung menunjukan hubungan antara laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas.. Metode tidak langsung ini mudah dari pada metode langsung. Pada penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode ini diawali dengan laba bersih sehingga diperoleh arus kas dan aktivitas operasi. Dalam metode tidak langsung, arus kas aktifitas operasional, arus kas aktifitas investasi dan arus kas pendanaan disusun berdasarkan laporan laba rugi bersih.

Langkah langkah yang digunakan dalam pencatatan arus kas yaitu laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan dari penerimaan atau pembyaran kas untuk operasi sebelumnya dan setelahnya , dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atas pendanaan.

Penyusunannya yang diawali dengan data laporan laba rugi tahun ini dan disisapkan juga neraca tahun lalu dan tahun ini selanjutnya, laludibandingkan antar neraca periode sebelumnya dengan neraca periode berjalan untuk memperoleh data aktivitas keuangan perusahaan

pada periode tahun ini.

Dalam pencatatan arus kas di laporan keuangan BUMDes. Tercatat saldo kas dan setara kas di awal dan diakhir tahun, dimana saldo kas dan setara kas dari 2020 ke 2021 meningkat.

Dalam SAK ETAP Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

5. catatan atas laporan keuangan

dalam SAK ETAP Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang dasar penusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Mengungkapkan informasi yang di isyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan informasi



tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami

Pencatatan catatan atas laporan keuangan pada BUMDes ini menjelaskan tentang AD/ART, visi misi, status badan hukum, dan kebijakan lainnya. Unsur selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi seperti asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, pengukuran laporan, pengakuan, dan lain sebagainya. Unsur ini juga terdapat pengakuan atas kepatuhan laporan keuangan tersebut kepada aturan yang ada di dalam SAK ETAP. Namun terdapat kesalahan pencatatan karena dalam daftar pengakuan di aktiva tetap perlengkapan disebutkan dalam peralatan toko, dan tidak disebutkan apa saja yang termasuk dalam perlengkapan, berbeda dengan peralatan yang disebutkan satu persatu. Dalam akuntansi perlengkapan dan peralatan beda pengakuannya. Karena perlengkapan merupakan barang yang habis dipakai contohnya perlengkapan kantor yaitu polpen, kertas berbeda dengan peralatan yang masa pakainya lebih dari satu tahun contohnya peralatan kantor yaitu kursi, meja Hal ini dikarenakan kesalahan pencatatan dari pengelola laporan keuangan, sebab kurangnya pemahaman akuntansi dari pengelola laporan keuangan. Sehingga pencatatan perlengkapan dimasukkan dalam daftar peralatan toko.



4.3.2 Penyebab gagalnya penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan

BUMDes

a. Faktor internal penyebab gagalnya penerapan SAK ETAP

Faktor internal merupakan faktor yang di dalam yang mempengaruhi implelementasi dari pencatatan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Faktor internal yang menyebabkan gagalnya penerapan SAK ETAP ini yakni, pertama kurangngnya pemahaman akuntansi dari pengelola laporan keuangan yang ada di BUMDes tunas harapan mengenai standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, selama ini pengelola laporan keuangan hanya mengandalkan aplikasi dalam menyusun laporan keuangan dengan ketidaksesuaian yang ada dalam SAK ETAP yang telah ditetapkan. Pengelola laporan keuangan yang belum profesional dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

b. Faktor eksternal penyebab gagalnya penerapan SAK ETAP

Salah satu penyebab BUMDes tunas harapan yang tidak sempurna dalam penerapan SAK ETAP ini disebabkan pula karena tidak adanya pengawasan dari pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan BUMDes terutama dari pihak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait.

Pengelola laporan keuangan perlu diberikan pemahaman terkait



manfaat dari pencatatan akuntansi yang benar, lebih memperjelas pelaporan keuangan yang di sajikan agar tidak menyesatkan bagi pembaca laporan keuangan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini dapat dijelaskan bahwan penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan di BUMDes tunas harapan belum sepenuhnya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan. Dilihat dari Laporan keuangan yang disajikan masih kurang tepatnya penempatan akun, yang hal ini disebabkan pengelola laporan keuangan tidak memahami standar pelaporan keuangan yang berdasarkan peraturan standar akuntansi keuangan.

5.1 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti ingin mengajukan beberapa saran yaitu :



1. BUMDes tunas harapan melakukan pemisahan antaran
perlengkapan dan peralatan yang diakui dalamdaftar aktiva tetap di
penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus BUMDes,
agar tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan
2. BUMDes tunas harapan harus menyebutkan apa saja yang
termasuk dalam perlengkapan di dalam laporan keuangan.
agarlaporan keuangan yang disajikan lebih jelas, akurat dan
bersifat lengkap dalam semua hal dan yang pastinya sesuai
dengan SAK ETAP.
3. BUMDes tunas harapan sebaiknya memilih pengurus untuk
pengelola laporan keuangan yang mempunyai bassic dalam
akuntansi,agar penyusunan laporan keuangan tidak hanya
mengandalkan aplikasi dan pengelola laporan keuangan lebih
mengetahui penyusunan laporan keuangan yang benar dan tepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Fitri Nuraini dan Andrianto, Akuntansi keuangan Menengah 1, (Pasaruan: Qiara Media, 2020),
- Muhamad Gede, Teori akuntansi, (jakarta : Almahira, 2005),
- Muhamad Gede, Teori Akuntansi, (Jakarta : Almahira, 2005,)
- Harahap, Sofyan Syafri 2010 .Analisa Kritis atas Laporan Keuangan.
- Munawir, S. 2010. Analisis laporan Keuangan Edisi keempat. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta: Liberty
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Prihadi. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Yabbar, rahman dan ardhi Hamzah (2015) tata kelola pemerintah desa. Surabaya : penerbit pustaka
- Sugiyono. (2012). Memahami penelitian kualitatif “bandung : ALFABETA
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
- Mudrajad Kuncoro, (2013). “Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi” Edisi 4. Jakarta: Erlangg
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
- Hamid Patilima. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. ALFABET. Bandung
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Ikatan akuntan indonesia (IAI) 2009 Standar Akuntansi Keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan ikatan akuntan indonesia



Surjaweni V,W (2017). Analisis laporan keuangan. Pustaka baru press
Ikatan akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan ETAP.
Jakarta : ikatan akuntan indonesia







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3705/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Ombulo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

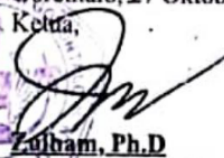
Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Maryam Halubangga
NIM : E1118013
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : DESA OMBULO KECAMATAN LIMBOTO BARAT
Judul Penelitian : PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK NO. 01 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BADAN USAHA MILIK DESA TUNAS HARAPAN DESA OMBULO KECAMATAN LIMBOTO BARAT)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 27 Oktober 2021

Ketua,


Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+





BADAN USAHA MILIK DESA TUNAS HARAPAN OMBULO KECAMATAN LIMBOTO BARAT

Jl. Amal Modjo Desa Ombulo Kec. Limboto Barat

SURAT KETERANGAN

01/Bumdes/T.H/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Felmi Lantowa, S.E,M.Ak
Jabatan	: Direktur BUMDes Tunas Harapan
Instansi	: Badan Usaha Milik Desa
Dengan ini menerangkan bahwa	:
Nama	: Maryam Halubangga
Nim	: E1118013

Yang Bersangkutan benar telah melakukan penelitian di BUMDes Tunas Harapan dengan judul " ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAT ETAP) NO.01 TENTANG PENYUSULAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)" Studi pada Badan Usaha milik Desa Tunas Harapan di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DIREKTUR BUMDES
TUNAS HARAPAN OMBULO



FELMI LANTOWA, S.E, M.Ak



Similarity Report ID: oia:25211:17946641

PAPER NAME

**E1118013+MARYAM HALUBANGGA+SK
RIPSI.docx**

AUTHOR

Maryam Halubangga

WORD COUNT

9027 Words

CHARACTER COUNT

58995 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

218.5KB

SUBMISSION DATE

May 31, 2022 1:39 PM GMT+8

REPORT DATE

May 31, 2022 1:42 PM GMT+8**● 27% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)



CURRICULUM VITAE

1. Personal Identity



Name : Maryam Halubangga
Date Of Birth : Suwawa, 30 Januari 2000
Adress : Desa Dumbayabulan, Du
 000 RW 000 Kec. Suwawa
 Kab. Bone Bolango
Religion : Islam

2. My Family

- Father : Darwis Halubangga
- Mother : Salma Nggolitu
- Siblings : 1. Sri Yunita Halubangga
 2. Windi Halubangga

3. Educational Background

- 2004 – 2006 : TK Dewi Sartika
- 2006 – 2012 : SD Negri 1 Suwawa Timur
- 2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Suwawa Timur
- 2015 – 2018 : SMA Negri 1 Kabila
- 2018 – 2022 : Universitas Ichsan Gorontalo Jurusan Akuntansi